

ABSTRAK

Hubungan kerja kemitraan yang sejajar telah terjalin antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota merupakan hubungan yang memiliki kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara keduanya itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Hubungan kerja yang setara ini membuat kebingungan dengan adanya Bupati/Walikota sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Theoretical Research*, dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berorientasi pada prinsip, doktrin, konsep ataupun asas yang mendukung penelitian ini. Kemudian rumusan masalah akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang sudah diklasifikasi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota belum terlaksana dengan baik dan tidak adanya kesejajaran antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan.

Kata Kunci : Kemitraan Sejajar, Fungsi Pengawasan, Prinsip Transparansi.

ABSTRACT

An equal partnership working relationship has been established between the Regent / Mayor and the Regency / City DPRD is a relationship that has an equal and partnership position. An equal position means that between the two have the same and equal position, meaning that they do not supervise each other. This is reflected in making policies and carrying out their respective duties and functions. This equal working relationship creates confusion with the presence of Regents / Mayors as leaders of government administration. This study uses the Theoretical Research research method, using a conceptual approach oriented to principles, doctrines, concepts or principles that support this research. Then the formulation of the problem will be analyzed prescriptively using legal materials that have been classified. The results of the research show that the supervisory function carried out by the Regency / City DPRD has not been implemented properly and there is no parallel between the Regent / Mayor and the Regency / City DPRD in terms of supervision

Keywords : Parallel Partnership, Monitoring, The Principle of Transparency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	4
1.4.2. Kegunaan Praktis	5
1.5. Keaslian	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13
1.6.6. Sistematika Pebulisan.....	14

BAB II PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEMITRAAN

SEJAJAR SEBAGAI HUBUNGAN KERJA.....	
2.1. Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah	16
2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26
2.2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah	26
2.2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan.....	27
2.2.3. Bupati/Walikota.....	28
2.2.4. DPRD Kabupaten/Kota	31
2.3. Hubungan Kemitraan Seajar	35
2.3.1. Pengertian Kemitraan	35
2.3.2. Pengertian Seajar	36
2.3.3. Tujuan Kemitraan	36
2.3.4. Manfaat Kemitraan	37

2.3.5	Prinsip Kemitraan.....	37
2.4	Teori-teori.....	40
2.4.1	Teori Kewenangan.....	41
2.4.2	Teori Pengawasan.....	41
2.4.3	Teori Pengawasan.....	41
BAB III	PEMBERLAKUAN HUBUNGAN KEMITRAAN SEJAJAR ANTARA BUPATI/WALIKOTA DENGAN DPRD KABUPATEN/KOTA	
3.1.	Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota.....	43
3.2.	Analisis Hubungan Kemitraan Sejajar antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota	53
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	74
4.2.	Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
	BIODATA PENULIS	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Orisinilitas dan Korelasinya.....	9
---------	-----------------------------------	---